

PEREMPUAN DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAM

Bahrul Hayat

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Email: wawandjunaedi@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the participation of women education in the perspective of human rights. The research is field study with a sample distribution from elementary School to college with the scope of research on aspects of illiteracy, formal education, and non-formal education. The research showed that the cause of gender disparity in education is closely related to religious, social, economic, cultural, and geographical factors. Although from legal aspect and educational policy, men and women are given equal access, but the various constraints restrict women's struggle to obtain equality of educational opportunities.

مستخلص

هذه المقالة معبّرة عن دور المرأة في التربية في وجه حقوق الإنسانية. هذه تؤخذ من تحقيق الواقع بنشرة مثال المدرسة الابتدائية حتى الجامعة. وهذا التحقيق يشتمل على ناحية الأمي والتربية الرسمية وغير الرسمية. فهناك رأس الخلاف الجنسى و هذا يتعلق بعامل الدين و الاجتماع والاقتصاد والثقافة والجروفية تعلقاً. و لو كانت المساواة بين الطالب والطالبة لكن تصعب الطالبة في حصول تلك المساواة.

Keywords: Perempuan, Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan, Partisipasi

A. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, titik berat pembangunan nasional adalah pembangunan bidang ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berkait erat dengan pendidikan, pelatihan, pemanfaatan potensi sumber daya manusia untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Menurut UNDP ada lima 'pembangkit energi' pengembangan sumber daya manusia yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, employment, dan kebebasan ekonomi dan politik. Kelima pembangkit energi tersebut berkait dan saling bergantung satu sama lain, akan tetapi pendidikan merupakan dasar untuk pembangkit energi yang lainnya. Pendidikan merupakan faktor esensial dalam peningkatan kesehatan, mempertahankan lingkungan yang berkualitas, memperluas dan meningkatkan tenaga kerja, dan melanggengkan (*sustaining*) tanggung jawab politik dan ekonomi. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan kekuatan pendorong (*driving force*) pembangunan.

Di sisi lain pendidikan merupakan institusi sosial utama yang memungkinkan tercapainya demokrasi dan ekualitas. Melalui pendidikan, budaya ditransformasi, fungsi dan status sosial direproduksi dan diciptakan. Dalam konteks sosial apapun, fungsi transformasi pendidikan tak dapat dielakkan karena menyentuh secara sosial dan ekonomi masyarakat lapisan bawah yang kurang beruntung. Transformasi pendidikan mengakibatkan egalitarian dan terbentuknya sistem sosial meritokrasi. Suatu sistem meritokrasi, sebagai lawan dari aristokrasi, adalah suatu sistem sosial di mana semua anggota masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya dan mendaki hirarki sosial. Secara ringkas, pada tingkat makro pendidikan mempunyai fungsi politis, sosial, dan ekonomi.

Sementara itu, dilihat dari sudut individu, tujuan pendidikan (Goodlad, 1984) meliputi aspek a) sosial (penyiapan untuk kehidupan sosial pada masyarakat yang semakin kompleks), b) intelektual (pengetahuan dan keterampilan akademik), c) personal (pengembangan tanggung jawab dan talenta individu), dan d) vokasional (persiapan untuk memasuki dunia kerja) .

Partisipasi individu, termasuk perempuan, dalam dunia pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh kesempatan pekerjaan yang memungkinkan seseorang melakukan mobilitas sosial. Masyarakat, terlepas dari tingkatan sosialnya, mempunyai aspirasi dan keyakinan yang tinggi bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mobilitas sosial. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan yang bernuansa segregasi gender merupakan sarana untuk mempertahankan masyarakat yang berstrata dengan membiarkan perempuan terpisah dari rute karir yang tersedia bagi sebagian besar masyarakat.

Berbicara mengenai pendidikan sebagai alat mobilitas sosial bagi setiap individu, sejumlah aturan internasional maupun nasional telah dirumuskan. Aturan-aturan ini dibuat untuk menjamin setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, membebaskan, dan nondiskriminatif. Uraian berikut akan memberikan deskripsi singkat bagaimana pendidikan sebagai hak dasar setiap individu diproteksi dalam sejumlah aturan internasional yang juga telah diratifikasi sejumlah negara dunia yang kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan pada level nasional.

B. Pendidikan Sebagai Hak Dasar Manusia

Berbicara mengenai hak minimum individu yang juga sering disebut dengan istilah *minimum core content of rights*, isu yang sering muncul adalah mengenai hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak-hak dasar yang baru disebutkan sebenarnya merupakan hak asasi manusia yang telah dibawa sejak lahir. Namun pada kenyataannya, setiap individu tidak secara otomatis bisa diperoleh hak-hak dasar tersebut. Tidak jarang hak dasar individu dirampas oleh sebuah kekuatan (*power*), baik secara personal maupun institusional, secara sporadis maupun sistematis. Dalam konteks inilah keberadaan pemerintah (negara) yang berdaulat menjadi sangat penting. Melalui pemerintahan yang berdaulat, hak-hak individu (baca: rakyat) diharapkan bisa terjamin dan tidak dilanggar.

Sebagaimana telah disinggung di atas, di antara hak dasar setiap individu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi

sangat penting bagi individu, karena hanya dengan pendidikan seseorang bisa berpengetahuan, bermartabat, dan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak di tengah komunitasnya. Di antara aturan internasional yang memberikan jaminan pendidikan adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, tepatnya pada Pasal 26 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Dari redaksi DUHAM di atas dapat diketahui dengan tegas bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan, setidaknya pendidikan dasar. Ketika sebagian masyarakat sulit untuk mendapatkan hak pendidikan yang merupakan hak dasarnya, pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut tidak lain adalah negara. Sadar akan kewajiban itu, maka *founding fathers* negara ini sejak awal telah mencantumkan jaminan atas hak pendidikan bagi rakyat Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara, tepatnya pada Pasal 28. Dewasa ini, jaminan tersebut terus mengalami penyempurnaan melalui amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28c ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahkan pemerintah semakin memperkuat hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada Bab IV Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Dalam Undang-undang tersebut juga dicantumkan secara eksplisit bahwa pihak yang wajib menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Aturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dalam konteks inilah pemerintah harus melakukan refleksi dan terus bekerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang yang ternyata masih jauh dari hak yang seharusnya diterima rakyat. Apalagi Pemerintah Indonesia telah terikat dengan Deklarasi Millenium PBB yang ditandatangani pada September 2005 bersama 190 negara lain.

Dalam kaitan hal tersebut, sangatlah tepat upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diwujudkan dalam empat strategi kebijakan pendidikan: pemerataan, relevansi, mutu, dan efisiensi. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan lokasi tempat tinggal, status sosial ekonomi dan jenis kelamin diwujudkan dalam program Wajib Belajar 9 Tahun yang sebenarnya telah dicanangkan pada tahun 1994. Program Wajib Belajar 9 Tahun, dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan keberhasilan program keluarga berencana diharapkan dapat memberi peluang dan kebebasan yang lebih luas bagi perempuan untuk ikut serta masuk pasar tenaga kerja dan berperan serta dalam pembangunan di segala bidang. Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan tentu mengalami berbagai hambatan, sehingga perlu terus dievaluasi untuk dapat merealisasikan kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif.

C. Ekualitas Kesempatan Pendidikan

Seperti dijelaskan di bagian terdahulu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat bergantung pada adanya ekualitas kesempatan (*equality of opportunity*) bagi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Ekualitas kesempatan bagi perempuan dalam berbagai bidang sangat ditentukan oleh adanya ekualitas kesempatan pendidikan (*equality of educational opportunity*). Ekualitas kesempatan pendidikan di sekolah merupakan masalah yang penting dalam kaitannya dengan hak perempuan. Terbukanya ekualitas kesempatan pendidikan menjanjikan akses yang sama bagi perempuan terhadap dunia kerja. Tidak adanya ekualitas kesempatan pendidikan mengakibatkan terjadinya inekualitas distribusi penghasilan.

Secara sederhana, ekualitas kesempatan pendidikan berarti memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, geografi, suku, agama, dan jenis kelamin untuk memperoleh pendidikan. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, dan pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan.

Dalam pengkajian lebih lanjut tentang ekualitas kesempatan pendidikan selain ekualitas akses, juga perlu adanya ekualitas kurikulum dan ekualitas perlakuan.

1. Ekualitas Akses Pendidikan

Institusi pendidikan merupakan titik sentra dalam perjuangan perempuan untuk memperoleh akses yang sama terhadap pekerjaan. Memperoleh akses yang sama terhadap berbagai program pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam perjuangan perempuan untuk memperoleh ekualitas kesempatan pekerjaan dan kesempatan lainnya.

Ekualitas akses pendidikan adalah pemerataan kesempatan yang sama bagi semua warga pria maupun perempuan untuk memasuki pendidikan baik untuk pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan kejuruan, melalui jalur formal (sekolah) dan jalur non-formal (luar sekolah). Terjaminnya ekualitas akses pendidikan bagi pria dan perempuan diharapkan keadilan dalam pelayanan pendidikan akan tercapai.

2. Ekualitas dalam Sistem Persekolahan dan Kurikulum

Ekualitas akses pendidikan barulah merupakan pintu gerbang pertama untuk tercapainya ekualitas kesempatan pendidikan. Sistem persekolahan dan kurikulum pendidikan mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam ekualitas kesempatan pendidikan. Disadari atau tidak, pengelompokan institusi pendidikan (persekolahan) ke dalam bermacam jenis kejuruan dan program secara tidak disengaja (implisit) telah mengarah pada terciptanya segregasi gender di dunia pendidikan.

Dengan pertumbuhan pekerjaan kantor (*white-collar occupations*) yang semakin pesat, perempuan merupakan sumber tenaga kerja potensial untuk posisi administrasi kantor seperti sekretaris, pengetik, dan tenaga administrasi. Secara tidak sengaja sekolah telah berperan penting dalam melanggengkan segregasi gender dalam pekerjaan. Berbagai program pendidikan kejuruan dan spesialisasi bisnis dan kesekretariatan cenderung sebagian besar diikuti oleh perempuan. Hal ini berarti kurikulum yang khas perempuan (segregasi gender) telah mendorong terciptanya sektor pasar kerja yang mempunyai segregasi gender.

Institusi pendidikan hams mengambil tindakan yang positif untuk menjamin bahwa perempuan mempunyai akses yang sama kepada semua kurikulum. Adanya sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang khusus menampung siswa dengan jenis kelamin tertentu, baik pria maupun perempuan, telah turut pula membentuk segregasi sekolah berdasarkan gender. Sekolah gabungan pria-perempuan (*co-education*) sering dianggap sebagai upaya untuk menghapuskan segregasi sekolah berdasarkan gender. Meskipun barangkali segregasi sekolah berdasarkan gender mempunyai beberapa keuntungan, namun segregasi sekolah berdasarkan gender juga seringkali membawa stigma inferioritas gender.

Perlakuan yang sama diperlukan bagi perempuan sebagai siswa dalam suatu institusi pendidikan untuk semua program pendidikan dan kurikulum. Ini berarti bahwa diskriminasi gender hams dikurangi dalam kurikulum pendidikan di mana pria merupakan mayoritas. Perempuan juga hams didorong untuk memasuki program-program pendidikan yang merupakan dominasi pria seperti

dalam bidang IPA, teknologi dan perekayasaan. Kebijakan pengelompokkan siswa SMA, misalnya, ke dalam beberapa program studi secara implisit membentuk segregasi internal di dalam sekolah. Dalam hal ini kebijakan penjurusan merupakan penolakan terhadap ekualitas kesempatan pendidikan.

Di samping sebagai siswa di institusi pendidikan, perempuan sebagai pegawai institusi pendidikan juga hams mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki berbagai jabatan kependidikan. Kebijakan yang memberi peluang yang sama pada pria dan perempuan untuk memegang posisi administratif, misalnya, perlu dikembangkan.

3. Ekualitas Perlakuan

Ekualitas kesempatan pendidikan juga mengacu pada bagaimana anak diperlakukan setelah mereka memasuki sistem dan program pendidikan. Stigma dan harapan gum dan pendidik lainnya (*self-fulfilling prophecy*) yang menganggap siswa perempuan 'inferior' dalam bidang-bidang studi tertentu harus dihilangkan. Program kegiatan olah raga siswa pria di sekolah yang seringkali memperoleh dukungan moral dan finansial lebih besar dari program kegiatan olah raga siswa perempuan kurang kondusif untuk tercapainya ekualitas perlakuan. Bias peran gender juga terjadi dalam cara guru memperlakukan dan memberi tugas siswa. Seringkali guru memberikan didikan mandiri lebih banyak kepada siswa pria dari pada siswa perempuan.

Stereotype yang bernuansa peran gender di institusi pendidikan juga sangat penting dalam menjamin ekualitas kesempatan bagi pria dan perempuan. Isi kurikulum dan buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah harus terhindar dari stereotype yang bermuatan peran gender ini.

D. Partisipasi Perempuan Indonesia Dalam Pendidikan

Walaupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan Pemerintah tidak membedakan murid yang masuk ke sekolah baik formal maupun non-formal menurut jenis kelamin (*gender neutral policy*), namun dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut tidaklah otomatis berdampak netral. Kenyataan ini tentu bukanlah sesuatu yang intensional (disengaja), tetapi lebih disebabkan karena berbagai kendala sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang

ada dalam masyarakat. Namun dari waktu ke waktu, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan teknologi ketidaknetralan dalam implementasi kebijakan pendidikan tersebut telah menurun secara tajam sehingga mengurangi pembedaan peran (*role differentiation*) dan inekualitas gender (*gender inequality*).

1. Buta Huruf

Buta huruf di kalangan perempuan merupakan masalah yang sangat penting karena perempuan merupakan mayoritas tenaga produktif di daerah pedesaan, dan sebagai ibu memegang peranan sentral dalam perawatan dan pendidikan anak. Enam puluh persen dari buta huruf perempuan di dunia adalah perempuan. Program pemberantasan buta huruf merupakan sarana untuk pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) dalam memperbaiki statusnya dan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dilihat dari upaya Pemerintah untuk memberantas buta huruf, persentase penduduk perempuan yang buta huruf (16,1%) masih sekitar dua kali lipat persentase penduduk pria (7,7%). Ketimpangan ini dengan jelas tergambar pada data seperti disajikan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa disparitas penduduk buta huruf sangat besar antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Penduduk buta huruf sangat terkonsentrasi di pedesaan (84,4%) dan hanya 15,6% berada di perkotaan. Lokasi tempat tinggal merupakan penyebab utama terkonsentrasinya penduduk buta huruf.

Data empiris juga menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan yang buta huruf hampir dua kali lipat lebih besar (33,6%) dibandingkan dengan persentase buta huruf pria (18,9%). Pencanangan Wajib Belajar 9 Tahun merupakan kebijakan yang tepat dalam mengurangi persentase penduduk buta huruf, khususnya di daerah pedesaan.

2. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah sistem pendidikan dengan struktur hirarkis dan pengurutan (*succession*) kronologis jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai pendidikan tinggi yang mencakup baik pendidikan umum dan kejuruan.

Data empiris untuk pendidikan formal menunjukkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan untuk perempuan relatif lebih kecil

dibandingkan dengan kesempatan pendidikan yang diperoleh oleh pria. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2 sampai Tabel 4.

Tabel 2 menggambarkan jumlah murid bam (kelas 1) di setiap tingkatan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan makin kecil jumlah siswa/mahasiswa perempuan dibandingkan dengan pria. Murid baru kelas/tingkat 1 perempuan di tingkat SD adalah 47,28% dan di PT (khusus PTN) hanya 40,31%. Perbedaan ini cukup konsisten terjadi di setiap daerah dan provinsi.

Hal yang sama juga terjadi untuk data jumlah murid seperti terlihat pada Tabel 3. Semakin tinggi jenjang pendidikan makin kecil murid perempuan dibandingkan dengan murid pria. Di tingkat SD jumlah murid perempuan 48,37% sedangkan di tingkat perguruan tinggi adalah 36,3%. Sementara untuk pria di tingkat SD 51,63% dan di tingkat perguruan tinggi sebesar 63,68%. Data empiris ini menunjukkan perbedaan yang relatif konsisten di setiap daerah dan provinsi.

Sebagai akibat langsung dari data di atas perbedaan jumlah dan persentase antara perempuan-pria juga terjadi pada data jumlah lulusan menurut tingkatan pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4. Makin tinggi tingkat pendidikan makin kecil jumlah lulusan perempuan. Di tingkat SD terdapat 49,54 % perempuan dan di tingkat Pendidikan Tinggi menjadi 36,99 %.. Sementara lulusan pria tingkat SD sebesar 50,46% dan menjadi 63,01% untuk tingkat perguruan tinggi.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa disparitas gender bersifat progresif (*progressive gender disparity*) sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar perbedaan jumlah dan persentase murid pria dan perempuan.

Dilihat dari jenis dan program pendidikan, data pada Tabel 2, 3, dan 4 juga menggambarkan adanya disparitas jumlah dan persentase murid pria dan perempuan. Sekolah kejuruan dengan spesialisasi teknik didominasi murid pria, sementara sekolah kejuruan dengan spesialisasi ekonomi dan kesejahteraan keluarga didominasi murid perempuan. Pada jenjang pendidikan tinggi,

disparitas gender juga semakin besar dari program non-gelar (S0) ke program gelar (S1).

Berbanding terbalik dengan data pada Tabel 2, 3, dan 4, dilihat dari jumlah murid yang mengulang, murid perempuan lebih kecil persentasenya dibanding murid pria untuk setiap tingkatan dan jenis sekolah seperti terlihat pada Tabel 5. Lebih jauh data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil jumlah murid perempuan yang mengulang. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan semakin banyak murid pria yang mengulang. Persentase mengulang murid perempuan di SD adalah 48,37% dan di SLTA 25,65%, sebaliknya jumlah mengulang murid pria di SD adalah 51,63% dan di SLTA meningkat menjadi 74,53%.

Pada Tabel 6 disajikan jumlah murid putus sekolah (*drop-out*) berdasarkan tingkatan dan jenis sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah murid pria yang putus sekolah selalu lebih besar dari murid perempuan untuk semua jenjang pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Di tingkat SD sebanyak 43,25 % yang putus sekolah adalah perempuan dan 56,75 % pria. Sedangkan di perguruan tinggi adalah hanya 8,66 % yang putus kuliah adalah perempuan dan sisanya (91,34%) adalah pria. Hal ini berarti mahasiswa perempuan yang masuk di Perguruan Tinggi Negeri telah tersaring dengan baik dan memiliki motivasi tinggi untuk sukses sehingga tidak terjadi jumlah putus kuliah yang tinggi dibandingkan dengan di tingkat yang lebih rendah.

Perbandingan antara jumlah dan persentase pria dan perempuan yang berkaitan dengan arus murid seperti mengulang kelas dan putus sekolah cukup menarik untuk diperhatikan. Perempuan ternyata memiliki daya tahan yang lebih baik untuk tetap tinggal di sekolah (*retention*) dibandingkan dengan pria. Hal ini juga dikaitkan dengan motivasi perempuan untuk sukses dalam pendidikan yang semakin konsisten sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Tabel 7 menyajikan data persentase melanjutkan untuk setiap tingkatan dan jenis sekolah. Secara umum, untuk setiap jenjang pendidikan persentase melanjutkan murid pria lebih besar dari murid perempuan. Sebanyak 57,69% lulusan SD perempuan melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP), dan 64,92% lulusan SD pria yang melanjutkan ke SLTP. Namun pada tingkat PTN, persentase melanjutkan ke PTN untuk perempuan (7,66%) tidak begitu besar perbedaannya dengan pria (9,14%). Perbandingan angka melanjutkan di setiap jenjang pendidikan untuk setiap provinsi menunjukkan persentase yang relatif sama.

Tabel 8 menyajikan angka partisipasi murni (APM) di tingkat SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah) tidak begitu banyak perbedaannya antara perempuan dan pria yaitu berturut-turut 91,48% dan 91,52%. Di tingkat SLTP (termasuk Madrasah Tsanawiyah), angka partisipasi kasar (APK) cukup berbeda yaitu 49,62 untuk perempuan dan 56,25 untuk pria. Di tingkat Sekolah Lanjutan Atas, termasuk Madrasah Aliyah, angka partisipasi kasar (APK) 31,14% untuk perempuan dan 38,67% untuk pria. Pada jenjang perguruan tinggi terjadi perbedaan yang cukup besar yaitu 4,64% untuk perempuan dan 8,18 untuk pria.

Data di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan semakin kecil sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Sebaliknya, angka partisipasi pria semakin besar sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Tabel 9 menyajikan jumlah guru menurut jenis kelamin di setiap tingkatan dan jenis sekolah. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru perempuan di jenjang Sekolah Dasar sedikit lebih banyak dari guru pria, berturut-turut 51,24% dan 48,76%. Akan tetapi, semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah guru pria semakin banyak dibanding guru perempuan. Guru perempuan di jenjang SD sebanyak 51,24%, dan menurun tajam di jenjang perguruan tinggi (PTN) menjadi 24,03%. Persentase dosen perempuan di PTN hanya seperempat dari seluruh dosen yang ada di PTN. Hal yang relatif konsisten juga ditemukan setelah data dipilah ke dalam provinsi.

3. Pendidikan Non-Formal

Yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah semua kegiatan yang diorganisasi di luar sistem formal persekolahan baik yang berfungsi terpisah maupun sebagai bagian penting dari tujuan pendidikan.

Berbeda dengan jumlah murid di persekolahan, partisipasi perempuan pada pendidikan luar sekolah menunjukkan hal-hal yang cukup menarik. Tabel 10 sampai 12 menyajikan data pendidikan masyarakat yang terdiri dari jumlah

warga belajar dan tamatan menunjukkan bahwa program pendidikan masyarakat merupakan program pendidikan yang mengarah pada pemberantasan buta huruf seperti Kejar Paket A dan Kejar Usaha cenderung didominasi oleh peserta perempuan. Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah warga belajar Kejar Paket A dan Kejar Usaha lebih banyak perempuan yaitu 54,92% dan 67,78%. Sedangkan Kejar Paket B lebih banyak pria (60,32%).

Sesuai dengan jumlah warga belajar, jumlah tamatan Kejar Paket A dan B menunjukkan angka yang lebih besar pada tamatan perempuan dibandingkan dengan pria yaitu 53,93% dan 57,27%. Berdasarkan data pada tabel 12 diperoleh gambaran bahwa warga belajar Kejar Paket A yang terbanyak adalah yang berusia 7-12 tahun, sedangkan Kejar Paket B terbanyak adalah berusia 13-29 tahun. Hal ini sangat mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun.

Tabel 13 menyajikan data pembinaan generasi muda dilihat dari jenis kelamin dari kegiatan. Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum program-program kegiatan kepemudaan cenderung lebih didominasi oleh peserta pria yaitu sekitar 53,82%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan generasi muda yang lebih aktif adalah kaum pria.

Tabel 14 menyajikan data kegiatan olah raga dilihat dari jenis kelamin dan kegiatan. Seperti halnya program pembinaan generasi muda, program-program pembinaan keolahragaan baik dalam pemasalan olahraga maupun pembibitan olahraga juga lebih banyak didominasi oleh kaum pria. Bahkan olahraga dirgantara 100% dilaksanakan oleh pria. Olahraga yang paling banyak diminati kaum perempuan adalah pemasalan olahraga yang bersifat perorangan yaitu sebanyak 47,48% dibandingkan dengan jenis olahraga lainnya.

E. Penutup

Walaupun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan Pemerintah tidak membedakan murid yang masuk ke sekolah baik formal maupun non-formal menurut jenis kelamin (*gender neutral policy*), namun dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut tidaklah otomatis berdampak netral. Data empiris menunjukkan bahwa dalam pendidikan formal masih terjadi Disparitas

Gender Progresif. Partisipasi perempuan dalam pendidikan formal semakin kecil sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

Kenyataan ini lebih memprihatinkan apabila dikaitkan dengan partisipasi perempuan pekerja yang masih terkonsentrasi pada pekerja yang berpendidikan rendah, baik dilihat dari segi lapangan usaha, kategori jabatan, maupun status pekerjaan.

Dalam pendidikan non-formal partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding pria. Namun hasil dari upaya ini belum sepenuhnya menghilangkan disparitas gender dilihat dari jumlah penduduk buta huruf. Jumlah penduduk buta huruf perempuan lebih besar dari pria. Hal ini juga berakibat terhadap besarnya persentase angkatan kerja perempuan yang buta huruf yang hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan persentase buta huruf pria.

Pangkal dari terjadinya disparitas gender di dunia pendidikan ini sangat erat berkaitan dengan faktor agama, sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Meskipun dari segi hukum dan kebijakan pendidikan, pria dan perempuan diberikan ekualitas akses yang sama, berbagai kendala di atas membatasi perjuangan perempuan untuk memperoleh ekualitas kesempatan pendidikan. *All men are created equal, but it is obvious that men and women are born into unequal circumstances.*

Dalam kaitan ini tepat sekali konsep paradigma pasar yang dikemukakan oleh Fuchs (1983). Diberikan ekualitas akses yang sama, manusia (baca: orang tua) senantiasa dihadapkan pada keharusan memilih. Dalam membuat pilihan orang tua selalu berusaha berbuat yang terbaik dengan berbagai kendala yang dihadapinya (biaya, waktu, informasi, dsb.). Pilihan mereka dipengaruhi oleh suatu 'harga' relatif dilihat dari biaya, waktu, moral, dsb.. Pilihan mereka juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang meliputi agama, budaya, sosial, ekonomi dan faktor eksternal lainnya.

Di samping adanya berbagai kendala di atas, di dunia pendidikan masih ditemui berbagai kebijakan yang secara tidak disengaja kurang mendukung tercapainya ekualitas program dan kurikulum pendidikan, dan ekualitas perlakuan di sekolah. Disparitas gender secara tidak disengaja telah terjadi pada institusi pendidikan baik pada status perempuan sebagai siswa maupun

sebagai pegawai institusi pendidikan. Di institusi pendidikan seolah terjadi apa yang disebut *men rule women and women rule children*.

Sangatlah tepat upaya Pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun dalam upaya pemberdayaan perempuan. Program Wajar 9 Tahun ini tentu akan lebih mencapai sasaran apabila berbagai sistem penyampaian (*delivery system*) pendidikan dilakukan.

LAMPIRAN

TABEL 1
JUMLAH DAN PERSENTASE BUTA HURUF
MENURUT JENIS KELAMIN SENSUS PENDUDUK 1990

JENIS	DESA	%	KOTA	%	JUMLAH
LAKI-LAKI	6.057.213	87,43	870.816	12,57	6.928.029
PEREMPUAN	12.085.541	82,97	2.480.547	17,03	14.566.088
JUMLAH	18.142.754	84,41	3.351.363	15,59	21.494.117

TABEL 2
JUMLAH MURID BARU TINGKAT I
MENURUT JENIS KELAMIN TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Sekolah Dasar (SD)	1998,656	47,28	2.228.699	52,72	4.227.355
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLIP)	938,555	46,59	1.075.769	53,41	2.014.324
Umum/Sekolah Menengah Pertama (SMP)	933,009	46,90	1.056.402	53,10	1.989.411
Kejuruan & Teknologi	5,546	22,26	19,367	77,74	24,913
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP)	4,983	97,82	111	2,18	5,094
Sekolah Teknik (ST)	563	2,84	19,256	97,16	19,819
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	557,710	42,55	753,041	57,45	1.310.751
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	366,856	44,56	456,494	55,44	823,350
Kejuruan & Teknologi	190,854	39,16	296,547	60,84	487,401
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	169,038	66,63	84,666	33,37	253,704
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK)	17,197	95,79	755	4,21	17,952
Sekolah Teknik Menengah (STM)	4,619	2,14	211,126	97,86	215,745
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	39,987	40,31	59,206	59,69	99,193
Program S0	12,001	43,44	15,625	56,56	27,626
Program S1	27,986	39,10	43,581	60,90	71,567

TABEL 3
 JUMLAH MURID MENURUT JENIS KELAMIN
 TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
 TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Sekolah Dasar (SD)	12.740.956	48,37	13.599.039	51,63	26.339.995
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2.550.230	45,73	3.026.810	54,27	5.577.040
Umum/Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2.534.704	46,15	2.957.473	53,85	5.492.177
Kejuruan & Teknologi	15,526	18,30	69,337	81,70	84.863
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP)	14,020	96,85	456	3,15	14.476
Sekolah Teknik (ST)	1,506	2,14	68,881	97,86	70.387
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1.666.299	44,24	2.100.351	55,76	3.766.650
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.142.885	46,03	1.340.116	53,76	2.483.001
Kejuruan & Teknologi	523,414	40,78	760,235	59,22	1.283.649
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	464,352	68,06	217,911	31,94	682.263
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK)	47,214	96,19	1,870	3,81	49.084
Sekolah Teknik Menengah (STM)	11,848	2,15	540,454	97,85	552.302
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	188,910	36,32	331,191	63,68	520.101
Program S0	39,907	42,88	53,152	57,12	93.059
Program S1	149,003	34,89	278,039	65,11	427.042

TABEL 4
JUMLAH LULUSAN MENURUT JENIS KELAMIN
TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Sekolah Dasar (SD)	1.626.836	49,55	1.657.095	50,46	3.283.931
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLIP) Umum/	757.117	46,16	883.316	53,36	1.640.555
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	752.117	46,64	860.378	53,36	1.612.495
Kejuruan & Teknologi	5,122	18,25	22,938	81,75	28,060
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP)	4,726	97,06	143	2,94	4,869
Sekolah Teknik (ST)	396	1,71	22,795		23,191
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	521,792	44,62	2647,590	55,38	1.169.382
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	371,818	5,24	450,105	54,76	821,923
Kejuruan & Teknologi	149,974	43,16	197,485	56,84	347,459
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	133,565	68,19	62,314	31,81	195,879
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK)	13,399	96,63	468	3,37	13,867
Sekolah Teknik Menengah (STM)	3,010	2,19	134,703	97,81	137,713
Perguruan Tinggi Negeri (PIN)	26,899	36,99	45,816	63,01	72,715
Program S0	8,180	39,19	12,714	60,85	20,894
Program S1	18,719	36,12	33,102	63,88	51,821

TABEL 5
JUMLAH MENGULANG MENURUT JENIS KELAMIN
TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Sekolah Dasar (SD)	1129,187	48,37	1.205.230	51,63	2.334.417
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Umum/	17.810	30,66	40.271	69,34	58.081
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	17.681	31,01	39.330	68,34	57.011
Kejuruan & Teknologi	129	12,06	941	87,94	1,070

Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama(SKKP)	101	97,12	3	2,88	104
Sekolah Teknik (ST)	28	2,90	938	97,10	966
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	8,563	25,65	24,821	74,35	33,384
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	6,403	26,78	17,510	73,22	23,913
Kejuruan & Teknologi	2,160	22,81	7,311	77,19	9,471
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	1,728	44,78	2,131	55,22	3,859
Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga(SMKK)	343	92,45	28	7,55	371
Sekolah Teknik Menengah (STM)	89	1,70	5,152	98,30	5,241

TABEL 6
JUMLAH MURID PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN
TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Sekolah Dasar (SD)	401,893	43,25	527,237	56,75	929,130
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLPP)	193,543	48,24	207,701	51,76	401,244
Umum/Sekolah Menengah Pertama (SMP)	191,460	48,47	203,566	51,53	395,026
Kejuruan & Teknologi	2,083	33,50	4,135	66,50	6,218
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama(SKKP)	1,937	99,95	1	0,05	1,938
Sekolah Teknik (ST)	146	3,41	4,134	96,59	4,280
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	98,974	45,88	116,728	54,12	215,702
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	43,708	43,02	57,886	56,98	101,594
Kejuruan & Teknologi	55,266	48,43	58,842	51,57	114,108
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	51,174	68,84	23,162	31,16	74,336
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK)	3,591	99,86	5	0,14	3,596
Sekolah Teknik Menengah (STM)	501	1,38	35,675	98,62	36,176
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	20,216	8,66	213,305	91,34	233,521
Program S0	2,174	5,65	36,281	94,35	38,455
Program S1	18,042	9,25	177,024	90,75	195,066

TABEL 7
ANGKA MELANJUTKAN MENURUT JENIS KELAMIN
TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Pria	
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	57,69	64,92	61,34
Umum/Sekolah Menengah Pertama (SMP)	57,35	63,75	60,58
Kejuruan & Teknologi	0,34	1,17	0,76
Sekolah Kesejahteraan Klg. Pertama (SKKP)	0,31	0,01	0,16
Sekolah Teknik (ST)	0,03	1,16	0,60
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	59,42	70,00	65,07
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	39,09	42,43	40,87
Kejuruan & Teknologi	20,33	27,57	24,20
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	18,01	7,87	12,59
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK)	1,83	0,07	0,89
Sekolah Teknik Menengah (STM)	0,49	19,63	10,71
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	7,66	9,14	8,48
Program S0	2,30	2,41	2,36
Program S1	5,36	6,73	6,12

TABEL 8
ANGKA PARTISIPASI MENURUT JENIS KELAMIN
TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin		Rata-rata
	Perempuan	Pria	
Sekolah Dasar (SD)	91,48	91,52	91,50
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	56,25	49,62	53,01
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	38,67	31,14	34,93
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	8,18	4,64	6,31

Catatan: Khusus SD angka partisipasi murni (APM) Selain SD angka partisipasi kasar (APK)

TABEL 9
 JUMLAH GURU MENURUT JENIS KELAMIN
 TIAP TINGKATAN DAN JENIS SEKOLAH
 TAHUN 1992/93

Tingkatan dan Jenis Sekolah	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Sekolah Dasar (SD)	591.239	51,24	562.577	48,76	1.153.816
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	149.080	38,96	233.668	61,05	382.748
Umum/Sekolah Menengah Pertama (SMP)	146.507	39,04	228.806	60,96	375.313
Kejuruan & Teknologi	2.573	34,61	4.862	65,39	7.436
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP)	1.215	79,57	312	20,43	1.527
Sekolah Teknik (ST)	1.358	22,99	4.550	77,01	5.908
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	98.338	32,95	200.113	67,05	298.451
Umum/Sekolah Menengah Atas (SMA)	71.880	35,34	131.528	64,66	203.408
Kejuruan & Teknologi	26.458	27,84	68.585	72,16	95.043
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA)	16.046	33,47	31.896	66,53	47.942
Sekolah Menengah Kesejahteraan Klg. (SMKK)	3.540	75,06	1.176	24,94	4.716
Sekolah Teknik Menengah (STM)	6.872	16,21	35.513	83,79	42.385
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	10.887	24,03	34.414	75,97	45.301

TABEL 10
 JUMLAH WARGA BELAJAR MENURUT JENIS KELAMIN
 TIAP JENIS KEGIATAN
 TAHUN 1992/93

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Kejar Paket A	369,904	54,92	303,658	45,08	673,562
Kejar Paket B	2,421	39,68	3,680	60,32	6,101
Kejar Usaha	100,609	67,78	47,821	32,22	148,430

TABEL 11
JUMLAH TAMATAN WARGA BELAJAR MENURUT JENIS KELAMIN
TIAP JENIS KEGIATAN
TAHUN 1992/93

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Kejar Paket A	254.505	53,93	217.402	46,07	471.907
Kejar Paket B	2.668	57,27	1.991	42,73	4.659

TABEL 12
JUMLAH WARGA BELAJAR MENURUT KELOMPOK USIA
DAN JENIS KELAMIN TIAP JENIS KEGIATAN
TAHUN 1992/93

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Kejar Paket A	369,904	54,92	303,658	45,08	673,562
7-12 th	18,111	56,08	14,185	43,92	32,296
13-44 th	323,064	55,02	264,131	44,98	587,195
>45 th	28,729	53,13	25,342	46,87	54,071
Kejar Paket B	2,421	39,68	3,680	60,32	6,101
13-29 th	1,729	43,21	2,272	56,79	4,001
30-44 th	662	34,02	1,284	65,98	1,946
>45 th	30	19,48	124	80,52	154

Tabel 13
JUMLAH PESERTA KEGIATAN KEPEMUDAAN
MENURUT JENIS KELAMIN TIAP JENIS KEGIATAN
TAHUN 1992/93

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Kepemimpinan dan Ketrampilan	2.279.722	46,74	2.597.372	53,26	4.877.094
Kesegaran Jasmani & Daya Kreasi	1.237.200	47,63	1.360.069	52,37	2.597.269

Patriotisme dan Idealisme	3.293.230	46,21	3.833.704	53,79	7.126.934
Kesadaran Berbangsa & Bernegara	274,413	42,18	376,235	57,82	650,648
Kepribadian dan Budi Pekerti	366,810	45,76	434,707	54,24	801,517
Peningkatan & Perluasan Partisipasi	802,290	44,09	1.017.422	55,91	1.819.712
Jumlah	8.253.665	46,18	9.619.509	53,82	17.873.174

TABEL 14
**JUMLAH PESERTA KEGIATAN OLAHRAGA
 MENURUT JENIS KELAMIN TIAP KEGIATAN
 TAHUN 1992/93**

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Perempuan	%	Pria	%	
Pemasalan Olahraga	8.822.48	45,06	10.758.648	54,94	19.581.134
Olahraga Beregu	2.728.468	41,77	3.803.155	58,23	6.531.623
Olahraga Perorangan	5.383.136	47,48	5.953.819	52,52	11.336.955
Olahraga Dual	231,564	41,19	330,608	58,81	562,172
Olahraga Beladiri	67,933	46,26	78,915	53,74	146,848
Olahraga Petairan	4,576	31,65	9,881	68,35	14,457
Olahraga Dirgantara	662	37,74	1,092	62,26	1,754
Olahraga Ketangkasan	45,351	32,31	95,007	67,69	140,358
Olahraga Tradisional	360,796	42,60	486,171	57,40	846,967
Pembibitan Olahraga	1738,429	36,73	2.994.758	63,27	4.733.187
Olahraga Beregu	660,925	29,36	1.590.187	70,64	2.251.112
Olahraga Perorangan	600,939	45,23	727,809	54,77	1.328.748
Olahraga Dual	380,222	43,00	503,985	57,00	884,207
Olahraga Beladiri	35,196	36,66	60,819	63,34	96,015
Olahraga Petairan	423	23,63	1,367	76,37	1,790
Olahraga Dirgantara	0	0,00	670	100,00	670
Olahraga Ketangkasan	39,454	32,14	83,317	67,86	122,771
Olahraga Tradisional	21,270	44,43	26,604	55,57	47,874

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syamsiah. 1993. "Pengembangan Dukungan Ilmiah Bagi Peningkatan Peranan Perempuan." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.
- Djojonegoro, Wardiman (Februari 1994). "Pendidikan dan Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Nasional." dalam Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Menteri Urusan Perempuan, Jakarta.
- Fuchs, Victor R. 1983. *How We Live*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hallak, J. (1990) *Investing in the Future*. Oxford, UK: UNESCO-IIEP-Pergamon Press.
- Maturbongs, R. T. D. 1993. "Kendala dalam Meningkatkan Pendidikan Perempuan di Irian Jaya." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.
- Napitupulu, W.P. 1989. *On Literacy in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Oey-gardiner, M. 1993. "Perbedaan Gender dalam Hubungan Pendidikan dan Kerja." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.
- Soemirat, Juli. 1993. "Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan IPTEK." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.
- Spring, J. 1989. *American Education: An Introduction to Social and Political Aspects* (4th ed). New York: Longman Inc.
- Sudrajat, I. dan Sri Rahayu. 1993. "IPTEK Berwawasan Gender." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian,

Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.

Suleeman, E. 1993. "Pendidikan Perempuan Indonesia." dalam Makalah yang disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Ditjen Dikti, Depdikbud, Cisarua-Bogor.